



Judul : Ketika politik "nggak" lagi "keren"
Tanggal : Senin, 27 November 2017
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 1 dan 11

Ketika Politik "Nggak" Lagi "Keren"

PERKEMBANGAN kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik yang menyeret nama

Ketua DPR RI Setya Novanto ditanggapi oleh berbagai kalangan dengan rasa prihatin.

Keprihatinan itu didasari dari tak kunjung berakhirknya kasus korupsi dengan pejabat publik yang tersangkut masalah hukum berasal dari berbagai instansi pemerintah dan lembaga negara.

Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, keprihatinan masyarakat itu dilengkapi dengan perasaan masyukul ketika pejabat publik yang terkena kasus hukum melakukan sejumlah tindakan agar dapat terhindar dari proses hukum, bahkan mengamankan posisi politiknya.

Dalam perkembangan di parlemen, setelah penahanan Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Wakil Ketua DPR RI Fah-

ri Hamzah menegaskan kepemimpinan DPR RI tetap berjalan normal, meskipun ketua DPR RI Setya Novanto tidak dapat bekerja setelah menjadi tahanan KPK.

Ia mengatakan kepemimpinan di DPR RI adalah kolektif kolegial. Dalam kepemimpinan kolektif kolegial, pimpinan DPR RI yang jumlahnya lima orang dapat saling mengantikan tugas-tugas pimpinan.

Menurut Fahri Hamzah, kalau saat ini pimpinan DPR RI yang aktif menjadi empat orang, tetap dapat berjalan normal karena setiap pimpinan yang sedang bertugas dapat menjalankan tugas pimpinan lainnya secara kolektif kolegial.

Pimpinan DPR RI, kata dia, telah menerima dua surat dari Setya Novanto dengan tulisan tangan pada Selasa (21/11) petang, yang isinya meminta agar jabatannya tidak berubah, yakni sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan sebagai

Ketua DPR RI.

Kedua surat itu masing-masing ditujukan kepada ketua DPR RI dan DPP Partai Golkar.

Sementara itu Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan proses penyidikan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto yang berjalan tidak terpengaruh oleh surat yang dikirimkan Novanto agar MKD tidak melanjutkan proses perkara.

Dia mengatakan proses penyidikan perkara yang berjalan di MKD bersifat independen sehingga tidak bisa dipengaruhi siapapun, termasuk Pimpinan DPR.

Dasco menjelaskan MKD memproses laporan masyarakat dalam perkara dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Novanto, dan prosesnya saat ini baru rapat internal verifikasi laporan.

Menurutnya, proses di MKD masih berjalan dalam verifikasi perkara dan perlu waktu untuk men-

gambil keputusan.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan sebenarnya MKD pada Selasa (21/11) mengadakan rapat internal dalam rangka verifikasi dugaan pelanggaran etik dengan meminta pandangan fraksi-fraksi, namun batal karena ada beberapa pimpinan fraksi yang tidak bisa hadir.

Dasco mengatakan hingga Rabu (22/11) pagi, Keskretariatan MKD masih mencocokkan jadwal agenda rapat MKD dengan pimpinan fraksi untuk diadakan rapat pekan depan sehingga belum dipastikan jadwal rapat konsultasi tersebut.

Ia mengatakan pandangan fraksi-fraksi itu sesuai dengan aturan di UU MD3, aturan tata beracara, dan tata tertib DPR sehingga fraksi tidak mempermasalahkan rapat tersebut, namun karena jadwal yang dibuat kemarin mendadak.

Bersambung Halaman 11



Ketika Politik “Nggak” Lagi “Keren”

Dikatakannya, mengapa dalam perkara Novanto itu perlu memanggil pimpinan fraksi, karena terkait dugaan pelanggaran etik menyangkut kelembagaan dan pimpinan DPR.

Menurut dia selama ini belum pernah ada kasus yang membawa institusi lembaga DPR dan Pimpinan DPR se-hingga ada pendapat fraksi-fraksi yang meminta pandangan fraksi secara bersamaan.

Dari sejumlah media sos-

ial dan informasi berbagai kangan, beredar surat yang ditanda tangani Setya Novanto yang ditujukan kepada Pimpinan DPR.

Dalam surat itu disebutkan bahwa dirinya saat ini sedang menghadapi kasus hukum dugaan korupsi proyek KTP elektronik, sehingga memohon kepada Pimpinan DPR untuk memberikan kesempatan kepada dirinya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan dalam kasus tersebut.

Selain itu, Novanto juga meminta Pimpinan DPR untuk sementara waktu tidak diadakan rapat pleno. Sidang MKD terhadap kemungkinan penon-aktifan dirinya sebagai Ketua DPR dan selaku anggota DPR.

“Nggak” Keren Langkah-langkah yang diambil oleh elit politik membuat banyak kangan masyarakat menilai seharusnya ada keputusan yang lebih baik yang diambil oleh elit atau para pejabat publik tersebut.

tersebut.

Eugenia Ribka Agatha (18), mahasiswa sebuah universitas swasta di kawasan Gading Serpong mengatakan terkait kasus KTP elektronik dan proses hukum yang dijalankan KPK, ia menilai seharusnya siapapun yang terlibat menghormati proses hukum yang berlangsung.

Bagi Eugenia, kasus ini membuat masyarakat terhambat untuk memperoleh KTP, karena itu perlu ada kejelas-



an dan sanksi yang keras bagi pihak-pihak yang memetik keuntungan yang tidak sah dari proyek ini.

Mahasiswa lainnya, Kristian Hendra (17) melihat dari sisi yang lain dalam kasus ini. Menurut Kristian, sebagai seorang pejabat publik yang sudah disumpah saat dilantik, mereka yang berada di posisi itu seharusnya menepati janji mereka dan mengundurkan diri bila telah mencederai kepercayaan publik.

Seseorang yang berada di posisi itu, katanya, seharusnya justru menjadi panutan masyarakat dengan tingkah laku dan tindak-tanduk yang menghormati hukum dan memuliakan masyarakat.

Sedangkan Aurelia Gracia (17), mahasiswa yang tinggal di Alam Sutera, yang tahun ini merupakan tahun pertama ia memiliki KTP mengatakan Indonesia yang merupakan negara hukum seharusnya bisa menegakkan hukum dan

menghadirkan keadilan bagi semua kalangan.

Baik Eugenia, Kristian maupun Aurelia sepakat dunia politik tak lagi sakral dan agung bila para penggiatnya tak mendorong kebijakan-kebijakan yang berpihak pada konstituen mereka.

Bagi mereka, generasi milenial, politik bisa saja tak lagi mentereng dan sakral ketika para pegiatnya justru melukai perasanaan orang-orang yang mereka wakili. ■ (ant/zis)